



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jendral Sarwo Edhie Wibowo No.2 P.O. BOX 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)
Fax: (0293) 364910 Telex : 22716 Magelang 56101
Website : www.inspektoratmagelangkota.go.id , Email : inspektoratmgkota@yahoo.com

Magelang, 7 Januari 2025

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik

di –

MAGELANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400.6.3.4/012/600

No.	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Permohonan Penyusunan DIK	1 (satu) Berkas	Demikian disampaikan, sebagai bahan lebih lanjut.

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

LARSITA, SE., M.Sc., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661202 199003 1 008

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Informasi	OPD	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi yang mengungkap proses dan dokumen pemeriksaan : a. Informasi dugaan pelanggaran disiplin ASN b. Informasi temuan dan rekomendasi dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat, Reguler dan Kasus c. Informasi tentang pengaduan masyarakat d. Laporan Keuangan SKPD Sebelum diaudit	INSPEKTORAT	- Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Pasal 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; - UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang; UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah _Permenpan NO PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit aparat pengawasan intern pemerintah -PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS -Peraturan BKN RI No 6 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan PP 94 Tahun 2021	-Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah -Menggangu jalannya pemeriksaan	-Melindungi hak pribadi ASN -Rahasia pihak terpeiksa terjaga	Dibuka apabila untuk kepentingan penyelidikan
2	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	INSPEKTORAT	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penetapan kebijakan mutasi dan promosi	Menjaga agar lingkungan kerja kondusif	terbatas dan saat pelantikan
3	Informasi terkait temuan dan rekomendasi dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan (Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Evaluasi,	INSPEKTORAT	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah PP 12 Tahun 2017 pasal 23 ayat 2	penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjaga obyektivitas penilaian	tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin walikota
4	Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	INSPEKTORAT	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Penyalahgunaan/intervensi oleh pihak yang tidak berhak	Penyalahgunaan/intervensi oleh pihak yang tidak berhak	tidak terbatas kecuali dengan tujuan tertentu
5	Informasi pribadi (data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf; database sistem informasi SDMI)	INSPEKTORAT	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi	ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.
6	Laporan Keuangan SKPD sebelum diaudit	INSPEKTORAT	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan/intervensi oleh pihak yang tidak berhak	menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	terbatas sampai laporan keuangan selesai audit
7	Surat-surat yang dikategorikan bersifat rahasia	INSPEKTORAT	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU no 43 tentang kearsipan pasal 44 huruf h		Menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	tak terbatas

No	Informasi	OPD	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
8	Dokumen Pengawasan Lainnya (dokumen tindak lanjut hasil pengawasan)	INSPEKTORAT	UU no 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i PP no 61 tahun 2010 pasal 9	Penyalahgunaan/intervensi oleh pihak yang tidak berhak	menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai

Magelang, 6 Januari 2025
INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

LARSITA, SE., M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008